

**TESIS**

**PERAN KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN EKS WANITA  
TUNA SUSLIA PADA MASYARAKAT PESISIR DI KEL.PATTINGNGALLOANG KEC.  
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan Oleh:

**NURUL RESKI FAUZIA BARSAS  
E052201007**



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERAN KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN  
EKS WANITATUNA SUSILA PADA MASYARAKAT PESISIR DI  
KEL.PATTINGNGALLOANG KEC.UJUNG TANAH  
KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan Oleh:

**Nurul Reski Fauzia Barsas**  
E 05220 1 007

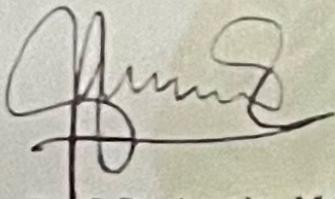
Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 13 Maret 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

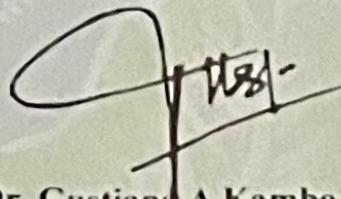
Menyetujui

Pembimbing Utama,



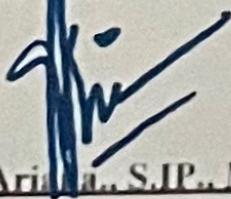
**Prof. Dr. Armin, M.Si**  
NIP. 19590118 198503 1006

Pembimbing Pendamping,



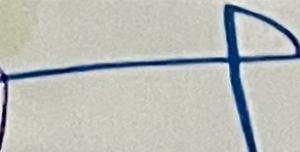
**Dr. Gustiana A Kambo, S.IP, M.Si**  
NIP. 19600914 198702 20001

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



**Dr. Ariana, S.IP, M.Si**  
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si**  
NIP. 19750818200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Reski Fauzia Barsas

Nomor Pokok Mahasiswa : E 05220 1 007

Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 November 2023



Yang Menyatakan

Nurul Reski Fauzia Barsas

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tak ada yang patut saya ucapkan atas pemberian rahmat-Nya selain pengabdian dan penyembahan hanya kepada-Nya. Salam penghormatan bagi Nabi-Nabi terdahulu para pembawa pencerahan risalah keteladanan, terkhusus Muhammad SAW sebagai utusan penutup dan penyempurna segala ajaran sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister pada program studi Magister Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Bakkarang, S.pd dan Almarhumah Ibunda ST. Syamsiah, S.pd yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, serta tidak pernah lelah dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga menjadi orang yang berguna yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan. Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya. semoga segala kebaikan senantiasa menyertai. Serta seluruh keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk doanya kepada penulis selama ini.

Ucapan terimah kasih dan penghormatan yang tulus dan ikhlas Penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, S.IP, M.Si. Selaku Pembimbing utama dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa sabar dan telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing Penulis. Untuk Penulisan, perbaikan dan penyelesaian karya ilmiah ini.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. Bapak Dr. H. A. Yakub, Ph.D. dan Bapak Dr. Adi Suryadi B, M.Si. Selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini. Kemudian, pihak-pihak lain yang telah membantu baik berupa bimbingan, bantuan semangat, dan doa

selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya Penulisan Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. ir. Jamaluddin Jompa., M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Kepada bapak Dr . Phil. Sukri Tamma, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Hasanuddin
3. Dr. Ariana Yunus, S.IP., M. Si selaku Ketua Program Studi Magister ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama dalam proses perkuliahan.
5. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya kalangan akademik yang ingin melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan studi ini.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Februari 2023

Penulis



Nurul Reski Fauzia Barsas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Konsep Civil Society .....	13
2.2 Tinjauan Tentang Teori Kelompok Kepentingan Nonasosiasi.....	20
2.2.1 Pengertian Kelompok Kepentingan .....	21
2.2.2 Kedudukan Kelompok Kepentingan Dalam System Politik ....	23
2.3 Teori Feminisme Liberal .....	26
2.3.1 Feminisme Liberal Abad ke-18:Pendidikan yang Sama untuk Perempuan .....	29
2.3.2 Feminisme Loberal Abad 19: Kesempatan Hak Sipil Dan Ekonomi Bagi Perempuan Dan Laki-Laki .....	30

2.3.3 Tindakan Feminisme Liberal Abad ke-20 .....	31
2.4 Teori Peran .....	36
2.5 Teori Self Esteem ( Penghargaan Diri ) .....	41
2.6 KerangkaPemikiran .....	47
2.7 Tinjauan Hasil Penelitian .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Pendekatan Jenis Penelitian .....	54
3.2 Lokasi Penelitian .....	56
3.3 Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti .....	57
3.4 Penetapan Informan .....	58
3.5 Sumber Data .....	59
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.7 Teknik Analisa Data .....	61
3.8 Tahap-Tahap Penelitian dan Jadwalnya .....	64
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
4.1 Penyebab Munculnya Wanita Tuna Susial di Kota Makassar .....	65
4.2 Gambaran Umum Kelompok Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Az -Zahrah Pattiangalloang.....	68
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Pemberdayaan yang dilakukan oleh KWN (Kelompok Wanita Nelayan) Fatimah Az-Zahrah dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Khususnya	

Eks Perempuan Tuna Susila Kelurahan Pattingalloang .....	79
5.1.1 Melakukan Pembimbingan Keterampilan, Karakter Dan Skill Untuk Peningkatan Kapasitas dan Pengembalian Kepercayaan Diri .....	80
5.1.2 Pemberian Pemahaman Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Eks Wanita Tuna Susila .....	86
5.1.3 Melakukan Penyuluhan Dan Pelatihan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	91
5.1.4 Peningkatan Spiritual Melalui Pembinaan Secara Teologis .....	95
5.2 Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan Di Kelurahan Pattingalloang.....	97
5.2.1 Pemerintah Hadir Dengan Jaminan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Eks Wanita Tuna Susila .....	99
5.2.2 Pemerintah Hadir Sebagai Upaya Membantu Kesejahteraan Sosial Eks Wanita Tuna Susila .....	103
5.3 Implikasi Teoritik.....	110
<b>BAB VI TUTUP .....</b>	<b>115</b>
6.1 Kesimpulan.....	115
6.2 Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Ujung Tanah Menurut Jenis Kelamin...	74
TABEL 4.2. Jumlah Anggota Keluarga Kelurahan Pattingngalloang .....	74
TABEL 4.3. Sarana Dan Prasarana Kesehatan .....	75
TABEL 4.4. Tingkat Pendidikan Kelurahan Pattingngalloang .....	76
TABEL 4.5. Status Pendidikan .....	77

Makassar, 10 November 20 22

## ABSTRACT

**Nurul Reski Fauzia Barsas.** Strengthening interest groups in the provision of former prostitute women in coastal communities in Pattingngalloang Village, Ujung Tanah District, Makassar City. (Supervised by Prof. Dr. Muhammad and Dr. Gustiana A Kambo, S.IP, M.Si)

This study aims to analyze and understand the form of empowerment of former prostitute women and to know and analyze government involvement in empowerment carried out by the Fatimah Az-Zahrah fisherwomen group to increase the confidence and self-capacity of former prostitute women in Pattinggalooang Village, Ujung Tanah District, Makassar City.

The type of research used by the author is qualitative research using descriptive methods. where primary data are obtained through in-depth observation and interviews, while secondary data are obtained from various literature, supporting documentation and archives that strengthen primary data. Data analysis techniques are derived from the words and spoken words of the observed actors. **The location of this research is in KWN Fatimah Az-Zahrah, Pattingngalloang Village, Ujung Tanah District, Makassar City.** This research was analyzed with civil society theory, editing groups, liberal feminism, and self-esteem theory.

The results in this study show that the empowerment carried out by the Fatimah Az-Zahrah group of fisherwomen in restoring self-confidence (1) Guiding skills, character and skills for capacity building and self-confidence restoration (2) providing legal understanding as an effort to protect former prostitute women. ( 3) Conduct counseling and training with the general election commission (KPU) Provide counseling related to our obligations as citizens. (4) Moral and spiritual improvement through theological formation. In the role of the government in implementing the work program of the Fatimah Az-Zahrah fisherwomen group, there are 2 things, namely: (1) The Government Comes with a Guarantee of Legal Certainty As an Effort to Protect the Rights of Ex-Prostitute Women, Protection of Ex-Prostitute Women and Their Families is carried out As an effort to uphold human rights KWN and the Government pays special attentionsuch as the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and others (2) The Government Exists as an Effort to Help the Social Welfare of Former Prostitute Women, plays an active role in efforts to overcome social problems The support from the Government can prove that the Fatimah Az-Zahrah Fishermen Women's Group (KWN) can help ease the Government's work in the realm of social.

keywords

Interest Groups, Empowerment, Ex-Prostitutes, Self-Esteem

Makassar, 10 November 2022

## ABSTRAK

**Nurul Reski Fauzia Barsas.** Penguatan Kelompo Kepentingan Dalam Pemberdayaan Eks Wanita Tuna Susila Pada Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Pattingngalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. (Di bimbing Oleh Prof. Dr. Muhammad dan Dr. Gustiana A Kambo, S.IP, M.Si)

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memahami bentuk pemberdayaan eks wanita tuna susila dan untuk mengetahui dan menganalisa keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah guna meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas diri eks wanita tuna susila di Kelurahan Pattingngalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. dimana data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumentasi pendukung dan arsip yang memperkuat data primer. Teknik analisis data berasal dari kata-kata dan kata-kata lisan dari aktor yang diamati. Lokasi penelitian ini berada di KWN Fatimah Az-Zahrah Kelurahan Pattingngalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. penelitian ini dianalisa dengan teori civil society, kelompok kepntingan, feminism liberal, dan teori self esteem.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemeberdayaan yang dilakukan kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah dalam pengembalian kepercayaan diri (1) Melakukan Pembimbingan Keterampilan, Karakter Dan Skill Untuk Peningkatan Kapasitas dan Pengembalian Kepercayaan Diri (2) Pemberian Pemahaman Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Eks Wanita Tuna Susila.(3) Melakukan penyuluhan dan pelatihan bersama komisi pemilihan umum (KPU) Memberikan penyuluhan terkait kewajiban kita sebagai warga. (4) Peningkatan Moral Dan Spiritual Melalui Pembinaan Secara Teologis. Dalam peran pemerintah dalam pelaksanaan program kerja kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah, terdapat 2 hal, yaitu: (1) Pemerintah Hadir Dengan Jaminan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Eks Wanita Tuna Susila, Perlindungan terhadap Eks Wanita Tuna suslia dan keluaganya dilakukan Sebagai upaya penegakan hak asasi manusia KWN dan Pemerintah memberikan perhatian khusus seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain (2) Pemerintah Hadir Sebagai Upaya Membantu Kesejahteraan Soial Eks Wanita Tuna Susila, berperan secara aktif melakukan upaya penanganan permasalahan sosial Adanya dukungan dari Pemerintah dapat membuktikan bahwa Kelompok wanita nelayan (KWN) Fatimah Az-Zahrah dapat membantu meringankan pekerjaan Pemerintah dalam ranah social.

Kata kunci

Kelompok kepentingan,Pemberddayaan eks tuna susila, Penghargaan diri

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Negara berkembang atau di Negara maju, masalah social biasanya dikaitkan dengan perempuan. Masalah tersebut biasanya kompleks, baik pada masalah social pada umumnya, maupun masalah yang sifatnya privat. Kompleksnya masalah perempuan biasanya ditengarai karena perilaku menyimpang, seperti pelanggaran norma, agama, gangguan ketertiban. Masalah social seperti prostitusi merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi untuk didengar, karena kata-kata tersebut sudah ada sejak lama dan kerap kali menjadi bahan perbincangan bagi setiap orang. Prostitusi sudah dikenal di seluruh dunia, hampir setiap kota memiliki dunia prostitusinya masing-masing, begitu juga dengan kota makassar.

Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota ini menjadi ibukota dari Provinsi Sulawesi selatan, dimana tempat ini menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta fasilitas sarana dan prasarana publik bagi penduduk di kota tersebut. Dengan semakin padatnya penduduk di Kota Makassar membuat situasi dan keadaan sosial cepat berubah, mulai dari pola kehidupan, status sosial, tingkat kesejahteraan hidup, dan berbagai aspek lainnya. Dengan

glamoritas yang dimiliki oleh masyarakat Kota Makassar, ternyata ada kehidupan 'terselubung' dibalik itu semua, salah satunya ialah kehidupan wanita tuna susila.

Wanita Tuna Susila (WTS) merupakan sebutan bagi wanita yang tidak susila. wanita tuna susila ini merupakan seseorang atau kelompok yang terbuang dari dunia yang baik dan terhormat. Istilah wanita tuna susila di dalam masyarakat dikenal juga dengan sebutan pekerja seks komersial (PSK), Wanita tuna susila (WTS) menikmati perannya sebagai seorang pekerja seks komersial dikarenakan anggapan dari mereka yang mengatakan bahwa pekerjaan ini cukup menjanjikan, uang dapat diperoleh dengan cara praktis, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi hingga keimana memicu mereka terjun kedalam dunia prostitusi. Namun sebenarnya, mereka mengalami konflik dalam dirinya (sisi psikis) dikarenakan adanya konflik internal (hati) yaitu antara membutuhkan uang dan perasaan berdosa, atau juga karena adanya perasaan tidak aman akan statusnya sebagai pekerja seks komersial dalam masyarakat.

Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk para wanita tuna susila berhenti menjalankan pekerjaannya sebagai PSK. Wanita tuna susila yang tidak lagi menggeluti pekerjaannya sebagai PSK disebut sebagai mantan atau eks wanita tuna susila terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang berhenti menjadi wanita tuna susila yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi adanya rasa trauma terhadap perlakuan pelanggan,

dihantui oleh rasa berdosa, serta adanya keinginan yang kuat dalam diri mereka untuk hidup sesuai dengan aturan dan ajaran agama. Faktor eksternalnya seperti adanya permasalahan dalam keluarga, hutang-hutang yang telah lunas, dan adanya dorongan dari lingkungan mereka. Tidak hanya dari kedua faktor yang telah dijelaskan, namun terdapat penyebab lain yang mendorong wanita tuna susila untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai PSK. Contohnya seperti menikah dengan orang diluar lokasi yang membuat mereka harus pindah mengikuti suaminya, umur yang semakin tua dan lain sebagainya.

Setelah wanita tuna susila berhenti atau tidak lagi menjadi PSK perlu adanya proses penyesuaian diri dalam beradaptasi, terutama didalam keluarga dan masyarakat di lingkungan wanita tuna susila tinggal, sehingga eks wanita tuna susila tidak merasa terasingkan. Hal itu dapat dilakukan apabila eks wanita tuna susila dapat membangun konsep diri dengan baik. Konsep diri dapat diartikan dengan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang individu memberikan penilaian tentang dirinya sendiri.

Situasi tersebut, akan memengaruhi kondisi lainnya, seperti kesadaran terhadap kepercayaan diri dan kemiskinan. Fenomena wanita tuna susila itu memang dirasakan semakin kompleks, baik dari penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya. Terlebih lagi dengan adanya pengaruh industrialisasi dan globalisasi yang sedang dan akan terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan membawa pengaruh pada peningkatan pertumbuhan dan

populasi wanita tuna susila serta lebih lanjut dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan bagi kehidupan social wanita tuna susia dan kesehatan moralnya.

Wanita tuna susila yang menjalankan profesinya dengan keterpaksa akan menimbulkan gangguan psikologis. berupa dihantui perasaan bersalah dan menurunnya rasa percaya diri sehingga merasa sungkan bergaul dalam masyarakat. Salah satu dari sekian banyak upaya untuk mengatasi masalah wanita tuna susila adalah melalui program pemberdayaan wanita tuna susila.

pemberdayaan wanita tuna susila itu dilakukan dengan tujuan terbinanya para penyandang masalah tuna susila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, dan tanggung jawab sosialnya, hingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar serta dapat hidup mandiri secara normatif sebagaimana layaknya anggota masyarakat yang lainnya. wanita tuna susila dapat berkarya sesuai dengan harkat dan martabat wanita dan menjadi anggota masyarakat secara normatif.

Secara tegas dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Wanita tuna susila secara hukum adalah bagian dari warga negara Indonesia, mereka adalah warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama seperti penduduk lainnya, mereka berhak memiliki penghidupan dan pekerjaan layak, dan merekapun berhak mengenyam kehidupan yang setara.

Sudah sewajarnya jika mereka mendapatkan pembinaan untuk kembali ke jalan yang benar, yang sesuai dengan norma dan agama yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan bagi eks wanita tuna susila menjadi suatu proses bagi mereka dapat diterima dalam lingkungan masyarakat dan dapat meningkatkan kesehatan mental mereka.

Kesehatan mental yang baik akan mungkin mendapatkan kebahagiaan dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Hal itu disebabkan kesehatan mental masuk dalam segala aspek dan aktifitas kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, sosial, politik, agama serta sampai pada bidang pekerjaan dan profesi.<sup>2</sup> Selanjutnya disebutkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menjamin kualitas dan kebahagiaan manusia. Akan tetapi kualitas dan kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh faktor kejiwaan, kesehatan dan keberagamaan yang dimiliki individu. Di samping itu kesehatan mental berupaya memecahkan segenap keruwetan batin manusia yang disebabkan oleh berbagai kesulitan hidup dan sekaligus berusaha memperoleh kebersihan jiwa, dalam pengertian tidak terganggu oleh berbagai ketegangan, ketakutan dan konflik. Untuk menunjang terbentuknya kesehatan mental bagi eks wanita tuna susia perlu adanya pemberdayaan pada mereka.

Isu pemberdayaan perempuan dari waktu ke waktu semakin mengemuka, seiring dengan semakin menguatnya slogan-slogan pengarusutamaan gender

---

<sup>1</sup>Steers, Richard M., *Efektifitas Organisasi, terjemahan Magdalena Jamin*, (Jakarta: Erlangga, 1985)

<sup>2</sup>Jaya, Yahya, *Menuju Optimalisasi Kesehatan Mental*, (Padang: Angkasa Raya, 2002)

di negeri Indonesia ..<sup>3</sup> Keberadaan perempuan dengan kondisi di atas, salah satunya dapat ditemukan pada masyarakat pesisir. Khususnya pada Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah. Dalam keadaan kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini dan keadaan geografis wilayah seperti kawasan Paotere yang kondisi ekonomi masyarakatnya nampak banyak yang berada pada tingkat ekonomi yang sedang ke bawah. Pemberdayaan beberapa eks perempuan tuna susila dalam peningkatan kepercayaan diri dan perekonomian mereka sudah dapat dikategorikan sebagai kaum yang mandiri secara ekonomi disebabkan karena adanya kelompok kepentingan yang memberdayakan eks wanita tuna susila yang bernama Kelompok Wanita Nelayan (KWN) Fatimah Az-Zahra. Sebagai organisasi diluar Pemerintah atau biasa disebut kelompok kepentingan KWN Fatimah Az-Zahrah berdirikan secara ekonomi hingga politik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan yang baik tanpa harus menggantungkan diri kepada Pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh pendiri Kelompok Wanita Nelayan selain mengelolah hasil laut beliau juga mendirikan koperasi yang bernama Fatimah Az-zahra yang bertujuan memasarkan hasil olahan yang dibuat oleh perempuan-perempuan dan eks wanita tuna susila tersebut.

Mengajarkan keterampilan kepada eks wanita tuna susila, kelompok wanita nelayan juga memngajari mereka bagaimana menjadi warga Negara yang baik dan taat terhadap Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung, Mizan, 1999)

Dengan adanya kelompok wanita nelayan yang dapat merangkul kaum perempuan khususnya eks wanita tuna susila dan meningkatkan perekonomian serta kepercayaan diri eks wanita tuna susila dengan berbagai program-program kerja yang mereka berikan, Setiap program kerja yang ada dikelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah senantiasa melibatkan Masyarakat terkhusus perempuan sehingga masyarakat dapat menerima keberadaan mereka. Program melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah yang ditujukan kepada para eks wanita tuna susila di Kelurahan Pattingngalloang. Mereka itu diharapkan dapat memiliki pengalaman dalam berbagai hal seperti mendidik anak, bersosialisasi yang baik terhadap masyarakat khususnya tetangga, dan pelatihan kewirausahaan untuk kaum perempuan. Hingga eks wanita tuna susila pun diajari cara mengurus administrasi,

Responsivitas KWN itulah yang mengubah pola pikir eks wanita tuna susila dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih baik. Selain mengajarkan mereka berwiraswasta kelompok ini juga mengayomi anak-anak yang ada diKelurahan Ujung Tanah. Ada 3 program kerja yang rutin diadakan setiap bulannya oleh kelompok wanita nelayan khusus buat eks wanita tuna susila dan anak-anak korban kekerasan rumah tangga (KDRT). Pertama pelatihan-pelatihan administarasi, kedua pelatihan wirausaha, ketiga pelatihan kesehatan. Program-program itu dirasa cukup membantu kaum eks tuna susila dalam segi perekonomian dan sebagai upaya kelompok wanita

nelayan guna membanu menumbuhkan kepercayaan diri eks wanita tuna susilah sehingga mereka dapat diterima di dalam lingkungannya.

Dalam bimbingan Pengembang diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan. Hal itu dilakukan oleh individu sendiri. seperti yang dijelaskan diatas bahwa bimbingan sebagai bantuan individu diharapkan mampu memahami diri dan lingkungannya, hal itu yang membuat kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah ini senantiasa membimbing eks wanita tuna susila dan masyarakat disekitarnya. Salah satu bimbingan yang rutin dilakukan kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah yaitu bimbingan moral dan sosial, Pembimbingan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kesadaran terhadap aktifitas kehidupannya selanjutnya. Pembimbingan didasari sebagai upaya untuk menjadikan eks wanita tuna susila dapat setara dan diterima oleh masyarakat. Berbagai pemberdayaan dan bimbingan yang dilakukan oleh kelompok wanita nelayan tak luput oleh bantuan dari beberapa pihak- pihak instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga di luar pemerintah.

Lembaga sosial yang ikut bekerja sama dengan kelompok wanita nelayan (KWN) Fatimah Az-Zahrah ada 2, pertama LBH (Lembaga Bantuan Hukum), kedua APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), itu dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan perekonomian eks wanita tuna susila dan masyarakat setempat kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah melakukan berbagai bentuk pemberdayaan seperti pemberdayaan dibidang ekonomi, administrasi, politik hingga meningkatkan spiritual mereka.

Meningkatkan pengetahuan bagi eks wanita tuna susila dapat diperoleh dari kerjasama antar lembaga yang memiliki kompeten dibidangnya masing-masing.

Dinas sosial juga ikut bekerja sama dalam berbagai program kerja yang diadakan oleh kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah tersebut salah satunya ialah ikut sertanya Dinas sosial dalam program kerja KWN serta Sekolah kepercayaan Diri. Dinas sosial biasanya memberikan bantuan berupa perlengkapan yang dibutuhkan dalam menjalankan program kerja tersebut seperti makanan, perlengkapan, dana hingga dukungan moral. Adanya dukungan dari Pemerintah dapat membuktikan bahwa Kelompok wanita nelayan (KWN) Fatimah Az-Zahrah dapat membantu meringankan pekerjaan Pemerintah dalam ranah sosial dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dikatakan kelompok wanita nelayan (KWN) Fatimah Az-Zahrah ini adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Organisasi diluar Pemerintah atau biasa disebut kelompok kepentingan KWN Fatimah Az-Zahrah berdikari secara ekonomi hingga politik. Hal itu dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan yang baik tanpa harus menggantungkan diri kepada Pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh pendiri Kelompok Wanita Nelayan selain mengelolah hasil laut beliau juga memberdayaakan mereka dengan program-program kerja pengembangan diri dan mendirikan koperasi yang bernama Fatimah Az-zahra yang bertujuan memasarkan hasil olahan yang dibuat oleh masyarakat dan eks wanita tuna susila tersebut.

Selain mendirikan koperasi dan mengajarkan keterampilan kepada eks wanita tuna susia dan masyarakat Kelurahan Pattinggalloang, kelompok wanita nelayan juga memngajari mereka bagaimana menjadi warga Negara yang baik dan taat terhadap Undang-undang yang berlaku di Indonesia khususnya berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan sehingga mereka paham terhadap diri sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul "Peran Kelompok Kepentingan Dalam Pemberdayaan Eks Wanita Tuna Susia Pada Masyarakat Pesisir Di Kel.Pattinggalloang Kec. Ujung Tanah Kota Makassar"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diteliti mengenai "Peran Kelompok Kepentingan Dalam Pemberdayaan Eks wanita Tuna Susila Pada Masyarakat Pesisir Kec. Pattinggalloang Kel.Ujung Tanah" rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang di lakukan oleh KWN ( Kelompok wanita nelayan ) Fatimah Az-Zahrah dalam mengembalikan kepercayaan diri Eks wanita tuna susila di Kelurahan Pattinggalloang?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan program- program kegiatan pemberdayan kelompok wanita nelayan di kelurahan pattinggalloang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh KWN ( Kelompok wanita nelayan ) Fatimah Az-Zahrah dalam mengembalikan kepercayaan diri Eks wanita tuna susila di Kelurahan Pattingngalloang
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran Pemerintah Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program- Program Kegiatan Pemberdayaan Kelpmpok Wanita Nelayan, sehingga dapat menjadi pembanding antar keduanya dalam hal melayani dan memberdayakan masyarakat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat yang dapat berguna bagi banyak kalangan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
  - a. Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori keilmuan khususnya pada kajian ilmu politik.
  - b. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian Keterlibatan kelompok kepentingan Terhadap Peningkatan kepercayaan diri eks wanita tuna susila dan Perekonomian kau perempuan diKelurahan Pattiangalloang

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam pemberdayaan perempuan khususnya eks wanita tuna susila.
- b. Sebagai salah satu bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan pemberdayaan weks wanita tuna susila.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi kelompok kepentingan untuk melakukan pemberdayaan perempuan khususnya eks wanita tuna susila.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan pendekatan dan teori yang membantu proses penelitian ini sehingga menjadi landasan penulis dalam menghasilkan bangunan penelitian secara utuh yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, adapun beberapa konsep teori yang digunakan: *civil society*, teori kelompok kepentingan, teori feminisme liberal, teori self esteem. Selanjutnya di bagian akhir diuraikan kerangka pemikiran yang akan penulis lakukan dalam penelitian tersebut.

#### **2.1 Konsep *Civil Society***

Sebagaimana diketahui dari kesejarahan bangsa-bangsa yang telah maju dan demokratis, keberadaan *civil society* yang kuat merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. *Civil society* di sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara. *Civil society* menjadi penting ia dapat menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui berbagai asosiasi, organisasi dan pengelompokan bebas di dalam rakyat serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Melalui kelompok-kelompok mandiri itulah rakyat dapat memperkuat posisinya *vis-à-vis* negara dan melakukan transaksi-transaksi wacana

sesamanya. Sedangkan melalui ruang publik bebas, rakyat sebagai warga negara yang berdaulat baik individu maupun kelompok dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Negara

Pers dan forum-forum diskusi bebas yang dilakukan para cendekiawan, mahasiswa, pemimpin agama, dan sebagainya ikut berfungsi sebagai pengontrol kiprah negara.<sup>4</sup> *Civil society* yang didalamnya bermuatan nilai-nilai moral tertentu, akan dapat membentengi rakyat dari gempuran sistem ekonomi pasar. Nilai-nilai itu adalah kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab, toleransi, kesamarataan, kemandirian dan seterusnya. Dengan masih kuatnya nilai kepercayaan dan tanggung jawab publik misalnya, maka akan dapat dikekang sikap keserakahan individual yang dicoba untuk dikembangkan oleh sistem ekonomi pasar melalui konsumerisme. Dengan diperkuatnya nilai toleransi dan kesamarataan, maka akan dapat dikontrol kehendak eksploitatif yang menjadi motor kapitalisme.

Keberadaan *civil society* di dalam rakyat modern tentu tak lepas dari hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural inheren di dalamnya. Komponen pertama termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangnya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, dan keberadaan organisasi-organisasi kepentingan dalam rakyat. Pada saat yang sama, *civil society* akan berkembang dan menjadi kuat apabila komponen-komponen kultural yang

---

<sup>4</sup>Azzurmadi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* Gagasan Fakta dan tantangan Cet 1

menjadi landasannya juga kuat. Komponen tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak berbicara dan berorganisasi, sikap toleran antar individu dan kelompok dalam rakyat, adanya tingkat kepercayaan publik (*publik trust*) yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok.

Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tubuh pada masyarakat

Masyarakat madani sebagian berjalan sendiri, tetapi sebagian juga tergantung kepada keputusan-keputusan politik ditingkat struktural, oleh karena itu kondisi yang kondusif perlu diciptakan, pertama deregulasi ekonomi yang mengarah pada penghapusan terutama hal-hal seperti kartel, monopoli, dominasi dan sistem koneksi atas prestasi ekonomi, kedua keterbukaan politik meskipun harus dilakukan dalam konteks tahap tertentu sesuai dengan perkembangan ekonomi berkelanjutan untuk mendorong terjadinya demokratisasi.<sup>5</sup> Ketiga perwujudan Negara hukum secara efektif, termasuk jaminan hak asasi manusia. Sikap dan perilaku masyarakat madani sebagai citizen yang memiliki hak dan kebebasan juga harus menjadi equal rights, yaitu

---

<sup>5</sup>Agus Widjojo. Indonesia Dalam Tradisi Menuju Demokrasi Cet.54

memperlakukan sesama warga Negara sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama, maka pemaksaan kehendak oleh orang atau kelompok masyarakat kepada orang atau kelompok masyarakat yang lain merupakan pengingkaran terhadap prinsip masyarakat madani.

*Civil society* dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas, dari ketergantungan terhadap Negara dan pasar *self reliance* (percaya diri) *self supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela dan taat akan nilai dan norma yang berlaku bebas dari ketergantungan negara dan pasar di maksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan( sosial, budaya, politik dan agama ) tanpa adanya intervensi Negara dan pasar, intervensi Negara terhadap masyarakat di bolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam khidupan bermasyarakat dan bernegara aturan main di langgar atau undang undang tidak di tegakkan. Dalam *civil society* swasembada adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa adanya ketergantungan.

Konsep *civil society* dipahami dari prespektif yang berbeda –beda dan hal itu merupakan perkembangan yang dinamis sesuai konteks, setting, ideology dan kepentingan setiap subjek. Dalam pendekatan Hegelian penekananya lebih pada pentingnya kelas menengah dan pemberdayaanya, khususnya pada sektor ekonomi bagi pembangunan *civil society* yang kuat, sementara itu dalam prespektif gramscian, penguatan *civil society* sebagai alat untuk menghadapi hegemoni ideologi Negara. *Civil society* adalah sebuah

arena tempat intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya adalah mendukung upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni Negara dalam pendekatan *tocqueveellin* penguatan *civil society* lebih menekankan pada penguatan organisasi –organisasi dan asosiasiindependen dalam masyarakat.

Konsep *civil society* yang biasa dipakai oleh para ilmuwan sosial politik di Indonesia sebagai entitas independen masyarakat madani (*civil society*) yang merupakan representasi dari banyak lembaga-lembaga independen diluar *state* telah mendorong proses politik yang lebih mencerminkan kehendak rakyat, di Iran basis utama masyarakat madani adalah (secara literal berarti “lingkaran”) yang merupakan kelompok informal individu-individu yang bertemu secara periodik. Kelompok ini dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan profesi keagamaan, politik, sosial, dan ekonomi sedangkan di Jerman, *civil society* hadir sebagai jawaban atas krisis *welfare state*, di Perancis *civil society* muncul sebagai jawaban atas semakin otoriternya kapitalisme, di Amerika *civil society* hadir sebagai alternative terhadap kelas, di Amerika Latin *civil society* hadir sebagai jawaban untuk mengisi ruang di antara keluarga dan kelompok face-toface dengan Negara. Elemen penting lain dari *civil society* adalah ekonomi pasar, media komunikasi yang independen, faktor-faktor keahlian dalam semua aspek kebijakan pemerintah yang independen dari pengaruh negara, dan jaringan kelompok-kelompok sukarela yang berkembang secara leluasa pada semua bidang kehidupan sosial, yang dengan itu orang-orang menangani urusan-

urusan mereka sendiri.

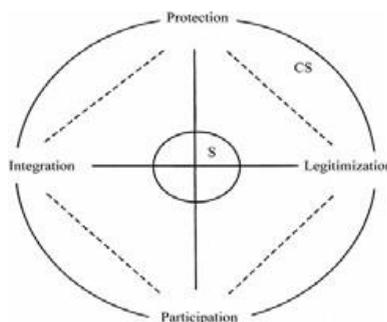
Hubungan antara negara dan civil society dapat didefinisikan sebagai suatu kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan negara. Dalam hal ini, civil society berperan sebagai suatu unsur yang dapat mengatasi negara, sehingga kekuasaan negara tidak mutlak dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan. Civil society harus memiliki sikap percaya diri (self-reliance), swasembada (self-supporting), sukarela (voluntary), taat akan nilai dan norma yang berlaku, dan bebas dari ketergantungan terhadap negara. Berdasarkan pengalamannya di Amerika, juga merasakan bahwa civil society memiliki kekuatan politis yang berfungsi untuk mengontrol serta mengekang dominasi negara. Demokrasi dan ruang publik merupakan 2 (dua) ciri untuk mengetahui keberadaan civil society. Usaha meruntuhkan ruang lingkup civil society hampir selalu dihubungkan dengan usaha untuk meruntuhkan demokrasi. maka hampir tidak mungkin apabila berbicara demokrasi tanpa membahas ruang publik. Demokrasi dapat dikatakan cacat apabila di dalamnya ada larangan untuk ruang partisipasi. Oleh karenanya, menurut Chandoke demokrasi memiliki hubungan dua sisi dengan ruang publik. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif.

Melihat hubungan masyarakat dengan negara, civil society dianggap mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: Pertama, civil society mempunyai aktivitas

memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapinya peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Ketiga, civil society sebagai kekuatan tandingan negara (counter balancing the state atau counter veiling forces). Muller menggambarkan pola hubungan

**Gambar 2.1**

**Pola Hubungan Civil Society dengan Negara**



civil society dengan negara sebagai berikut: Gambar 2.1 Pola Hubungan Civil Society dengan Negara Gambar di atas menunjukkan bahwa lingkaran luar mewakili seluruh masyarakat sipil, dan lingkaran kecil di sekitar pusat mewakili negara dan bidang kekuasaan politik, yaitu lingkup pengendalian informasi dan pengawasan sosial. Ujung atas dari sumbu vertikal adalah pelindung atau fungsi defensif, yang merupakan analogi dari konsep 'kebebasan negatif' yaitu tentang politik emansipatoris. Fungsi ini terutama

berkaitan dengan ketentuan jaminan hukum, mengamankan ruang otonomi sipil, dan pembebasan dari ketidaksetaraan. Pada ujung sumbu vertikal bawah adalah fungsi partisipatif yang sebaliknya, sesuai dengan konsep “kebebasan positif”. Dimensi ini berkonsentrasi pada keseluruhan kualitas lingkungan sosial, yang menampilkan peluang untuk politik realisasi diri dan kehidupan sipil terpenuhi dan puas. Kedua nilai membentuk konten dari dinamika pergeseran dalam hubungan antara masyarakat sipil dan negara.

## **2.2 Tinjauan Tentang Kelompok Kepentingan NonAsosiasi**

Kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan non-asosiasional (Non-Associational Interest Groups) ini terbentuk berdasarkan identitas dan sifatnya cair. Identitas tersebut terbangun berdasarkan garis agama, etnis, status sosial, sifat kedaerahan, ataupun kelas. Sebab itu, identitas yang mungkin merekatkan mereka dapat saja profesi mahasiswa, petani, nelayan, warga Jakarta, umat Islam, umat Buddha, rakyat miskin kota, korban pengusuran, korban lumpur Lapindo, dan banyak sekali.

Awalnya kelompok-kelompok non-asosiasional tersebut bersifat latent tetapi segera menjadi manifest tatkala ada suatu isu yang menyangkut basis kelompok mereka. Sejumlah individu dari kelompok mereka segera melakukan upaya pengorganisasian massa dan mengartikulasikan kepentingan kelompok kepada pemerintah.

Sebagai kelompok yang terorganisasi, selain keanggotaannya jelas, kelompok ini juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.<sup>6</sup> Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan hidupnya. Upaya memperjuangkan kepentingan tersebut membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk memperjelas tujuan dari adanya upaya tersebut. Bentuk kekuatan yang mempunyai daya dukung adalah kekuatan yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk inilah yang disebut dengan kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan juga dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan atau memperkuat penyampaian tuntutan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik.<sup>7</sup> Selain itu kelompok kepentingan juga dapat didefinisikan sebagai setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada waktu yang sama bekehendak memperoleh jabatan publik.<sup>8</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisa kelompok kepentingan Fatimah Az-zahrah sebagai organisasi yang mempunyai daya dukung masyarakat setempat.

### **2.2.1 Pengertian Kelompok Kepentingan**

Kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali di defenisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, which puts them into political*

---

<sup>6</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), h. 109

<sup>7</sup>Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 52

<sup>8</sup>*Ibid.*, h.53

*competition with other groups of interests.*<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan.

Ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial banyak memiliki prespektif dalam memahami sesuatu, termasuk konsep tentang kelompok kepentingan. Beberapa pakar memberikan gambaran dan batasan tentang kelompok kepentingan.

Hal ini mengatakan bahwa kelompok kepentingan adalah bagian institusional yang terdiri dari kombinasi pengaturan politik dan ekonomi. Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, akan membicarakan tentang kewujudan kelompok kepentingan, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik. Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak ditumpukan pada partai politik. Padahal dalam kenyataanya seiring dengan membiaknya kehidupan masyarakat dan munculnya sektor-sektor baru dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu diperhitungkan secara politik. Dalam hal ini kelompok kepentingan lebih menekankan pada kondisi masyarakat yang

---

<sup>9</sup>Benditt, Theodore M., *The Concept of Interest in Political Theory*, *Political Theory*, (No. 3, August 1975)

didalamnya terdapat kewenangan pemerintah yang terbatas, kebebasan ekonomi pasar, dan munculnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri dimana satu sama lain saling menopang. Seperti yang diterapkan pada kelompok wanita nelayan Fatimah Az-zahrah.

### **2.2.2 Kedudukan Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Politik**

keterbatasan partai politik, baik karena sumberdaya material, sumber daya manusia, orientasi ideologi, kultur, faksionalisme, kepentingan jangka pendek, minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah komunikasi, hubungan personal, dan lain-lain menyebabkan mereka terkadang tidak cukup dapat diharapkan untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif. Keadaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan.

Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok kepentingan yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak ditumpukan pada partai politik. Padahal dalam kenyataanya seiring dengan membiaknya kehidupan masyarakat dan munculnya sektor-sektor baru dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu diperhitungkan secara politik.

kelahiran kelompok kepentingan hampir mirip dengan partai-partai politik. Hanya saja partai politik lebih diorientasikan pada upaya untuk memenangkan suara pemilih dan menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan. Di Indonesia, beberapa kelompok kepentingan telah lahir mendahului partai-partai politik. Mereka bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Sebagian di antaranya malah menjadi cikal bakal partai politik.

Kemunculan kelompok kepentingan juga dipicu oleh mencuatnya isu-isu baru yang menjadi keprihatinan umum, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Bahkan belakangan banyak kelompok kepentingan yang memperjuangkan isu-isu tunggal yang spesifik. Hal tersebut mulai dari masalah kekerasan anak, perdagangan bebas, kesetaraan perempuan, lingkungan, perdagangan manusia, hak asasi manusia, hutang luar negeri, masalah energi, sumberdaya air, komunitas adat, iklim dan cuaca, hak konsumen, perlindungan binatang, pendidikan kaum marginal, ekonomi mikro, transgender, dan sebagainya. Gerakan ini, untuk sebagian, merupakan bagian dari gerakan sosial baru yang terus memperoleh tempat dalam masyarakat moderen. Sementara pada sektor-sektor tertentu, lahirnya kelompok kepentingan berwujud perjuangan kelompok-kelompok asosiasi profesi, perdagangan, subsektor kehidupan konsumen, kelompok-kelompok dalam birokrasi, kaukus dalam parlemen, aliansi para politisi dalam legislatif maupun eksekutif dan juga yudikatif yang memperjuangkan kepentingan kelompok melalui usulan-usulan, petisi-petisi, dan loby-loby tertentu yang disampaikan. Gelombang kelahiran

kelompok-kelompok kepentingan baru merebak secara nasional. Suasana politik yang demokratis yang ditandai dengan ledakan partisipasi mengakibatkan sebagian anggota masyarakat menyampaikan tuntutan-tuntutannya dengan menggunakan saluran-saluran baru di luar partai-partai politik, dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan<sup>10</sup>

keberhasilan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi agenda pemerintah memiliki kadar yang berbeda-beda antara satu sistem politik dengan sistem politik yang lain, dari satu negara dengan negara lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang turut menentukan pengaruh kelompok kepentingan, yakni: Aspek kebudayaan politik, struktur kelembagaan, watak dan sistem partai, watak dan gaya dalam kebijakan publik.

Jika dalam suatu masyarakat kedudukan kelompok kepentingan dipandang absah dan positif, maka keterlibatan individu-individu untuk bergabung di dalamnya akan didorong, dan proses politik yang melibatkan kelompok kepentingan dipandang sebagai wajar. Sementara struktur kelembagaan mengandaikan bahwa jika struktur kekuasaan suatu negara terdistribusikan secara beragam atau plural di antara kelompok-kelompok, maka itu akan memberikan tempat yang positif bagi kelompok kepentingan. Dengan kata lain, pemerintahan yang terbagi-bagi, di mana tidak ada satupun kelompok yang

---

<sup>10</sup>Horowitz, Donald L., *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Terj. Daryatno, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

bisa mendominasi akan lebih kondusif bagi tumbuhnya kelompok-kelompok kepentingan.

Tatanan kelembagaan yang tersentralisasi justru merusak keberadaan kelompok kepentingan. Pada aspek sistem politik, jika suatu sistem politik berwatak demokratis maka akan mudah bagi kelompok-kelompok kepentingan untuk eksis. Adanya sistem politik dengan corak kepartaian dominan atau hegemonik akan secara alami cenderung mempersempit ruang kelompok-kelompok kepentingan. Begitu juga sebaliknya, jika suatu sistem politik itu nondemokratis maka agak sukar bagi kelompok-kelompok kepentingan mengorganisir secara sukarela, tanpa dikooptasi oleh pemerintah.

### **2.3 Teori Feminisme Liberal**

Feminisme liberal Aliran feminis liberal sangat mendukung industrialialisasi dan modernisasi yang dianggapnya sebagai jalan bagi peningkatan kedudukan perempuan karena ia berdasarkan kapitalisme liberal yang menghendaki persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang termasuk bidang pekerjaan, partisipasi politik, dan pendidikan . Jadi, seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan persamaan perlakuan dengan laki-laki untuk memajukan eksistensinya. Peran dan kedudukan perempuan ternyata sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat tempat tinggal perempuan.<sup>11</sup>

Uraian itu berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa definisi peran telah diperkuat atas nama agama dan budaya yang dilakukan atas nama adat

---

<sup>11</sup>Sugiharti dan Suharto, *Kritik Sastra Feminis Teori dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

dan pembuat kebijakan laki-laki. Partisipasi perempuan dalam politik terhambat budaya yang mendefinisikan perempuan dalam pembagian kerja secara tradisional, sebagai ibu sekaligus pekerja domestik. agenda kaum feminis liberal tidak hanya menekankan masuknya perempuan ke dalam pasar tenaga kerja dan kemampuan mereka untuk bersaing di dalamnya, tetapi juga menegaskan penerimaan perempuan terhadap struktur normatif patriarkis laki-laki. Hal itu ditunjukkan dalam penyelenggaraan lokakarya-lokakarya bagi perempuan yang bersaing dalam pasar tenaga kerja atau penekanan tidak hanya berperan sebagai ibu dan ibu rumah tangga, tetapi mereka juga dapat berperan ganda.pada akses individual. Kaum feminis juga mempergunakan prinsipprinsip liberal untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan perundangan dan peradilan yang menghapuskan pembagian kerja secara seksual. Penekanan ini memberikan perempuan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam perspektif feminisme liberal perempuan berkedudukan dan berperan di sektor publik dan menuntut kesetaraan di dalamnya.Perempuan juga dapat bekerja dan menopang kehidupan ekonomi keluarga. Perempuan.

Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Alison Jaggar dalambukunya *Feminist Politic Sand Human Nature*, mengemukakan bahwa dalam pemikiran kaum liberal, sifat asariah manusia yang unik adalah kemampuan rasionalitasnya. Namun argumen klasik Aristoteles bahwa

manusia adalah *animal rationale* (binatang yang berasio) maka kaum liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijaksanaan.<sup>12</sup>

Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralism negara. Mereka menyadari bahwa Negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat maskulin, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum liberal feminis, perempuan cenderung berada didalam negara hanya sebatas warga Negara bukannya sebaga ipembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum feminis liberal mengenai kesetaraan setidaknya memiliki pengaruhnya

---

<sup>12</sup> Arivia, Gadis, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, 2006)

tersendiri terhadap perkembangan pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara.

### **2.3.1 Feminisme Liberal Pada Abad ke-18: Pendidikan yang Sama untuk Perempuan.**

Mary Wollstonecraft menulis *A Vindication of the Rights of Women* ditahun 1792, berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki akses yang sama seperti laki-laki pada kesempatan ekonomi dan pendidikan. Kaum feminis liberal kontemporer ingin membuat perempuan lebih terkenal dalam politik dunia, menghilangkan akses yang berbeda pada kekuatan dan pengaruh atas laki-laki dan perempuan dan dengan demikian untuk mencapai hak yang sama bagi laki-laki atau perempuan.

Mary Wollstonecraft, dalam bukunya *A Vindication of the Right of Women* menggambarkan masyarakat Eropa yang sedang mengalami kemunduran dimana perempuan dikekang didalam rumah tidak diberikan kesempatan untuk masuk dipasar tenaga kerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Padahal kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama juga bisa mengembangkan diri secara optimal, asal perempuan juga diberikan pendidikan yang sama denganpria.

Wollstone berusaha keras untuk mencari solusi bagi hal tersebut dan penyamarataan pendidikanlah solusinya. Dengan menyamaratakan pendidikan kaum perempuan dengan pendidikan kaum laki-laki, maka hal itulah yang akan

membuat seorang wanita itu menjadi *independent women*, bukan hanya menjadi boneka dan mainannya kaum lelaki.<sup>13</sup>

### **2.3.2 Feminisme Liberal Pada Abad ke-19: Kesempatan Hak Sipil dan Ekonomi bagi Perempuan dan Laki-laki.**

J.S Mill dan Harriet Taylor Mill bergabung dengan Wollestonecraft yang menekankan pentingnya rasionalitas untuk perempuan. J S Mill dan Harriet Taylor Mill lebih jauh menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki terwujud, tidak cukup diberikan pendidikan yang sama tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih dan hak milik pribadi serta hak-hak sipil lainnya.

Sumbangan lain pemikiran mereka berdua adalah dua-duanya menekankan pentingnya pendidikan, kemitraan dan persamaan. Mill lebih menekankan pada pendidikan dan hak, sedangkan Taylor lebih menekankan kemitraan. Mill lebih jauh juga mempertanyakan superioritas laki-laki, menurutnya bahwa laki-laki itu tidak lebih superior secara intelektual dari perempuan. Pemikiran Mill yang juga menarik bahwa kebajikan yang ditempelkan pada perempuan seringkali merugikan perempuan karena perempuan tidak bisa menjadi diri sendiri, sebab ia akan menjadi orang yang dikehendaki masyarakat.

---

<sup>13</sup>Arivia,Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminisme*, (J akarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003)

### 2.3.3 Tindakan Feminisme Liberal Abad ke-20.

*The Feminis Mistique* yang ditulis oleh Betty Frieden, bila kita bandingkan dengan buku yang ditulis sebelumnya oleh Wollestone, JS Mills dan Harriet Tylor terkesan tidak radikal. Menurut Betty perempuan kelas menengah yang menjadi ibu rumah tangga merasa hampa dan muram. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk berbelanja, jalan-jalan, perawatan, mempercantik diri, memuaskan nafsu sang suami, dan sebagainya. Sehingga solusi untuk menangani permasalahan tersebut adalah bahwa kaum wanita harus kembali ke sekolah dan kemudian memberikan kontribusi untuk ekonomi keluarga, berkarir namun tetap menjadi ibu rumah tangga juga, berjalan beriringan.

Namun dua puluh tahun kemudian ia menyadari dalam bukunya *The Second Stage* bahwa berkarir sekaligus menjadi ibu rumah tangga merupakan hal yang sangat sulit, selain harus melayani suaminya, juga harus melayani majikannya di kantor. Sehingga hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakuakn pergerakan sehingga menyadari keterbatasan keterbatasan dalam d irinya yang diciptakan masyarakat sehingga mampu untuk memperbaiki kondisi tersebut, harus menjalin suatu kooperasi dengan kaum laki-laki untuk merubah *mindset* masyarakat pada bidang publik dan privat yaitu suami pun harus ikut memikul beban keluarga dalam hal ekonomi, rumah tangga dan anak.

Feminisme liberal merupakan yang paling banyak penganutnya di Amerika. Pijakan para kaum feminis adalah *The Declaration of Independence* yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sama. Esensi gender

kaum feminis Amerika lebih berpijak pada analisis budaya dan sejarah. Jika dibandingkan dengan feminisme Prancis yang lebih menekankan pada psikoanalisis Freud. Elizabeth Cady merupakan tokoh feminis Amerika Serikat yang memprakarsai konvensi hak-hak perempuan di Seneca Falls pada 1848. Dia memperjuangkan hak suara kaum perempuan Amerika Serikat.

Teks *Declaration of Independence* menjadi pijakan Elizabeth untuk menulis *Declaration of Sentiments and Resolutions* yang menjadi hasil konvensi dalam pertemuan bersejarah, yaitu Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls pada 19 Juli 1848. Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama. Berdasarkan deklarasi tersebut, konvensi menuntut prinsip-prinsip liberal diterapkan, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Dia menegaskan bahwa kata *all the people* dalam kata *all the people* dalam konstitusi Amerika Serikat memiliki arti bukan hanya laki-laki didalamnya, tetapi perempuan juga. Kaum feminis di Amerika Serikat ini menuntut kedudukan profesional, pekerjaan ahli, memprotes upah rendah dan bekerja dengan upah yang sama dengan laki-laki.

Mereka juga menuntut hak pilih reproduksi dan pelegalan aborsi. Bagaimanapun, selalu ada pro dan kontra akan adanya pergerakan perempuan di Amerika Serikat ini, di satu sisi, mereka menganggap bahwa perempuan adalah pribadi yang sama dengan laki-laki, di sisi lain, mereka menganggap bahwa perempuan memiliki perbedaan secara biologis dan psikologis. Hal itu menyebabkan perdebatan amandemen 19 yang menjamin hak pilih

perempuan.

*The Liberal National Organization for Women (NOW)* berjuang untuk kemajuan pribadi perempuan. *NOW* menggunakan kasus hukum, melobi Kongres, dan menekan Presiden untuk menurunkan batasan-batasan bagi perempuan. Salah satu usulan utama *NOW* adalah ratifikasi *Equal Rights Amendment (ERA)* atau Amendemen Persamaan Hak yaitu menghapuskan perbedaan perlakuan terhadap jenis kelamin dalam bidang hukum. Hal ini berhasil memaksa *New York Times* menghapuskan iklan klasifikasi pekerjaan yang spesifik *Male Only* atau *Female Only*, juga restoran yang dulu hanya untuk konsumsi laki-laki. Integrasi dan reformasi adalah tujuan mereka bukan pemisahan dan revolusi.

Kritik yang paling utama bagi Feminisme Liberal adalah bahwa Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan ideologi Patriarki dan sama sekali tidak menjelaskan akar ketertindasan perempuan. Para kaum Feminisme Liberal hanya berkata bahwa sumber permasalahan perempuan selama ini adalah karena perempuannya itu sendiri dan solusi yang harus dilakukan adalah dengan membekali kaum perempuan dengan pendidikan dan juga pendapatan. Kaum Feminis Liberal dianggap tidak mampu untuk melihat bahwa perempuan merupakan golongan yang paling minim mendapat akses pendidikan, entah karena biaya yang mahal ataupun karena diskriminasi yang kerap terjadi. Kemudian bagaimana cara kaum perempuan bisa mendapatkan penghasilan yang layak, sedangkan sebagian besar dari mereka hidup dan tinggal

dinegara-negara dunia ketiga, yang merupakan korban imperialisme dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Gerakan feminisme liberal secara faktual juga dianggap tidak bisa menangkal serangan pemerintah terhadap perempuan, dimana dalam banyak kasus kemanusiaan, perempuan dan anak jadi dikorban pertama. Para kaum Feminis Liberal dianggap tidak berhasil dalam memberikan penjelasan mengapa secara seks masih terjadi ketidak setaraan gender yang sangat signifikan, bukan hanya dinegara berkembang, namun dinegara kapitalis maju pun masih kerap ditemukan perbedaan gaji dan kesempatan bagi kaum buruh wanita dan laki-laki.

Pola pikir dari arus feminisme yang lahir di Barat tersebut, ditinjau dari perspektif kelas setidaknya akan memunculkan dua cacat politik. Pertama, konsep ini akan menciptakan terpecahnya konsentrasi perjuangan kelas dari perempuan kelas tertindas untuk membebaskan diri dari kapitalisme. Kedua, konsep ini akan membentuk perspektif dikotomik-gender yang tidak produktif, yakni sebuah perspektif yang memandang bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah musuh.

Jean Bethke Elstain dalam bukunya *A Political Theorist*. Mengkritik bahwa semua perempuan ingin menjadi seperti laki-laki, mengadopsi sifat laki-laki (mengutamakan rasionalitas tidak boleh menunjukkan emosional) untuk mengurangi ketertindasannya. Padahal kaum perempuan tidak boleh menggunakan cara berpikir laki-laki, karena mereka pun memiliki cara berpikir

mereka sendiri yang dapat dibedakan dengan cara berpikir laki-laki. Sebagai seorang manusia, mengadopsi cara berpikir keduanya merupakan suatu keharusan agar tidak mendikotomikan *nurture* dan *nature* itu sendiri.

Pergerakan yang massif tersebut jangan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil, karena hal itu jelas akan menghancurkan kumunalitas, sehingga disinilah adanya *committe organizer* itu diperlukan untuk mengorganisasi masa. Dalam *Feminist Politics and Human Nature*, Alison Jaggar menformulasikan kritik yang kedua, seperti Elshain jaggar juga mengkritik feminis liberal bahwa perempuan harus mengadopsi nilai laki-laki yaitu rasionalitas dan otonomi. Sedangkan menurut Jaggar kita tidak boleh mendikotomi nilai laki-laki dan perempuan justru laki-laki dan perempuan harus mengadopsi nilai kedua-duanya secara seimbang.

Feminis liberal yang melihat perempuan itu satu, padahal menurut Jaggar perempuan itu tidak satu tapi bermacam-macam. Sehingga solusi dari kaum feminis belum bisa memecahkan segala persoalan karena mereka terlalu mengeneralisasi seluruh kaum wanita sebagai sesuatu hal yang sama tanpa berpikir adanya perbedaan diantara mereka. Tidak semua kaum wanita itu berkulit putih, kelas menengah, *straight* dalam sex, satu agama, satu budaya, satu ras, namun banyak juga diantara mereka yang berkulit hitam, kelas bawah, lesbian, biseksual, PSK, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda ras, sehingga faktor ketertindasan kaum wanita beserta solusi pemecahannya pun tentu akan berbeda satu samalain.

Feminisme liberal cenderung menerima nilai-nilai maskulin sebagai manusia, sehingga gerakannya mengarah pada emansipasi, cenderung membentuk manusia individualis. Padahal kenyataannya, manusia hidup berkelompok didalam masyarakat dan mempunyai pemikiran dualistik, kebebasan individu dan bertindak rasional adalah konsep maskulin. Padahal, secara alamiah terdapat perbedaan seks.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa menggunakan perspektif gender (feminisme) dalam hubungan internasional selain menawarkan cara pandang baru, juga menjadi penting dalam memahami kondisi ekonomi politik dan keamanan internasional. Teori feminisme merupakan teori sebagai upaya atas kritikan terhadap studi laki-laki untuk mentransformasikan tekanan struktural, dimulai dari pengalaman tekanan sebagai perempuan. Salah satu fokus kajian disini adalah mengenai feminisme liberal yang merupakan varian dari feminisme yang mendasarkan pemikirannya berdasarkan konsep liberal dimana pria dan wanita itu memiliki hak dan kesempatan yang sama, pria dan wanita merupakan makhluk yang sama-sama memiliki rasionalitas. Berbagai gerakan kaum feminis liberalpun muncul khususnya di Amerika, sebagai negara kelahiran, juga negara dengan jumlah kaum feminisme terbesar, yang memberikan pengaruh besar pada saat itu, walaupun banyak kritik yang menyerang pemikiran kaum feminis liberal.

#### **2.4 Teori Peran**

Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan

dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>14</sup>

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).<sup>15</sup>

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam

---

<sup>14</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

<sup>15</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :*Aktor* atau pelaku, yaitu orang yang sedang berprilaku menurut suatu peran tertentu.

- a. *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.
- b. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person, ego, atau self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego, ego, atau non-self*.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 216

untuk membentuk identitas aktor (*person, ego, self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (*target*) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

- a. Harapan tentang peran (*expectation*) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.<sup>17</sup>
- b. Norma (*norm*) Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut :
  1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 217

terjadi.

2. Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi kedalam dua jenis:

- Harapan yang terselubung (*convert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
- Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

c. .Wujud perilaku dalam peran (*performance*) Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah- istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari

nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang.

## **2.5 Teori *Self Esteem* (Penghargaan Diri)**

Coopersmith menyatakan bahwa *self esteem* adalah penilaian individu mengenai dirinya. *Self esteem* juga merupakan sikap positif ataupun negatif terhadap diri individu. Lebih lanjut Ferris, Brown, Lian, dan Keeping menyatakan bahwa *self esteem* merupakan penilaian positif maupun negatif secara

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 218- 219

menyeluruh terhadap diri seseorang.<sup>19</sup> Hal itu menyatakan sikap menyetujui atau tidak menyetujui hal yang berhubungan dengan dirinya, dan menunjukkan sejauh mana orang menganggap dirinya mampu, berarti, sukses, dan berharga

Santrock juga menjelaskan bahwa evaluasi yang terjadi terhadap dirinya sendiri ini adalah evaluasi secara positif maupun negatif. Berdasarkan hal tersebut, *self esteem* merupakan penilaian positif maupun negatif individu mengenai dirinya secara menyeluruh, di mana hal tersebut meliputi sikap dan pandangan individu akan dirinya. *Self esteem* juga membuat seorang individu memiliki keyakinan untuk mampu melaksanakan suatu hal maupun tugas.<sup>20</sup>

Aspek- aspek dan faktor- faktor Self Esteem Menurut Coopersmith (1967) terdapat empat aspek dalam self esteem yaitu :

- a. Power (kekuasaan). Kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol tingkah laku diri sendiri dengan orang lain. Hal ini ditandai dengan adanya penghargaan dan penerimaan dari orang lain terhadap ide-idenya dan hak-hak individu tersebut.
- b. Significance (keberartian). Kepedulian, perhatian, dan afeksi yang diterima individu dari orang lain, hal tersebut merupakan penghargaan dan minat dari orang lain dan pertanda penerimaan

---

<sup>19</sup>Murk.C.J., *Self-Esteem Research, Theory and Practice: Toward a Positive Psychology of Self-Esteem* (Ed 3) (New York: Springer Publishing Company Inc, 2006)

<sup>20</sup>*Ibid.*

dan popularitasnya. Hal ini ditandai dengan keramahan, ketertarikan .

- c. Virtue (kebajikan). Ketaatan mengikuti kode moral, etika dan prinsip-prinsip keagamaan yang ditandai dengan menjauhi tingkah laku yang dilarang dan melakukan yang diperbolehkan oleh moral, etika dan agama.
- d. Competence (kemampuan). Sukses memenuhi tuntutan prestasi yang ditandai oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan berbagai tugas atau pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas aspek-aspek self esteem terdiri dari empat aspek yaitu: Power (kekuasaan), Significance (keberartian), Virtue (kebajikan), Competence (kemampuan) Sedangkan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Esteem

Menurut Coopersmith (1967) faktor- faktor yang mempengaruhi self esteem adalah sebagai berikut.

- a. Penghargaan dan penerimaan dari orang- orang yang signifikan. Self esteem seseorang dipengaruhi oleh orang yang dianggap penting dalam kehidupan individu seperti orangtua dan keluarga.
- b. Kelas sosial dan kesuksesan. Kedudukan kelas sosial dapat dilihat dari pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal. Kelas sosial yang tinggi meyakinkan individu lebih berharga dari orang lain.

- c. Nilai dan inspirasi individu dalam menginterpretasikan pengalaman. Kesuksesan yang diterima oleh individu tidak mempengaruhi self esteem secara langsung melainkan disaring terlebih dahulu melalui tujuan dan nilai yang dipegang individu
- d. Cara individu menghadapi devaluasi. Individu dapat meminimalisasi ancaman berupa evaluasi negatif yang datang dari dirinya. Individu dapat menolak hak dari oranglain yang memberikan penilaian negatif terhadap dirinya. Berdasarkan uraian diatas faktor- faktor yang mempengaruhi self esteem adalah penghargaan dan penerimaan dari orang- orang yang signifikan, kelas sosial dan kesuksesan, nilai dan inspirasi individu dalam menginterpretasikan pengalaman dan cara individu menghadapi devaluasi.

*Self esteem* dapat dikatakan sebagai komponen evaluatif dari konsep diri . Ini merupakan rasa penghargaan terhadap diri sendiri dan merupakan hasil dari menilai dirinya sendiri. Evaluasi ini memperlihatkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan terhadap keberadaan dan keberartian Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *self esteem* merupakan komponen evaluatif dari konsep diri. Komponen evaluatif ini mengevaluasi diri terhadap kualitas- kualitas dalam dirinya, mengevaluasi diri secara positif dan negatif, dan terjadi secara terusmenerus.

*Self esteem* juga berhubungan dengan *well-being* dan kesejahteraan dan

kebahagiaan individu. Hanna menyatakan bahwa *self esteem* merupakan dasar untuk membangun *well-being* (kesejahteraan) dan kebahagiaan dalam kehidupan individu. Hal tersebut diperkuat oleh Orth dan Robins yang mengatakan bahwa *self esteem* merupakan prediktor dari kesuksesan dan *well-being* individu. *Self esteem* berkaitan dengan kepuasan hidup dalam berbagai macam kultur dan kebudayaan (Diener & Diener dalam Baumgardner & Crothers, 2010). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *self esteem* merupakan dasar untuk membangun *well-being* yang baik.

*Self esteem* juga merupakan salah satu dimensi dari konsep diri, serta merupakan salah satu aspek kepribadian yang mempunyai peran penting terhadap sikap dan perilaku individu (Santrock, 2007). Hal ini diperkuat oleh pernyataan McAuley, Elavsky, Motl, Konopack, Hu, di mana banyak penelitian yang menyebutkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh *self esteem*. Sejalan dengan hal tersebut, Gianini dan Smith menyatakan bahwa *self esteem* memiliki hubungan dengan perilaku makan. Menurut mereka, *self esteem* menjadi kunci keberhasilan individu dalam mengatur perilaku makan mereka. Individu yang memiliki *self esteem* yang rendah cenderung akan gagal mengatur perilaku makan mereka (Gianini & Smith, 2008). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *self esteem* merupakan salah satu aspek kepribadian yang memiliki peran penting dalam sikap dan perilaku. Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *self esteem* merupakan komponen evaluatif dari diri. *Self esteem* ini kemudian menilai diri terhadap kualitas-

kualitas dalam dirinya secara positif maupun negatif. Penilaian individu tersebut juga menjadi dasar untuk membangun *well-being* diri yang baik. Sehingga, *self esteem* menjadi aspek kepribadian yang berperan penting dalam sikap dan perilaku<sup>21</sup>

Tiga tujuan seseorang memberikan penilaian atau evaluasi terhadap diri sendiri. Masing-masing individu memiliki tujuan yang paling menonjol, tergantung dari lingkungan, kepribadian, dan budaya individu. Tujuan pertama adalah self assesment, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang akurat tentang diri sendiri. Tujuan ini banyak diterapkan oleh masyarakat pada budaya kolektifis Tujuan berikutnya adalah sebagai self enhancement, yaitu untuk mendapatkan informasi positif tentang diri sendiri. Masyarakat pada budaya Barat yang sebagian besar menganut budaya individualis. Tujuan terakhir, self verification, yaitu untuk mengkonfirmasi informasi yang sudah diketahui tentang diri sendiri. Individu yang menonjol pada self verification memandang dirinya dalam perspektif negatif yang enggan untuk berubah.

self-esteem dapat membantu individu untuk menciptakan dan mempertahankan ikatan sosial yang kuat. Self-esteem juga membantu individu meningkatkan penerimaan sosial dan menghindari social exclusion. Self-esteem dengan kata lain berfungsi untuk memantau kemungkinan adanya penerimaan atau penolakan sosial terhadap individu. Hal ini juga memberikan

---

<sup>21</sup>Murk.C.J., *Self-Esteem Research, Theory and Practice: Toward a Positive Psychology of Self-Esteem* (Ed 3) (New York: Springer Publishing Company Inc, 2006)

gambaran kepada individu terkait cara pandang individu tersebut terhadap dirinya sendiri.

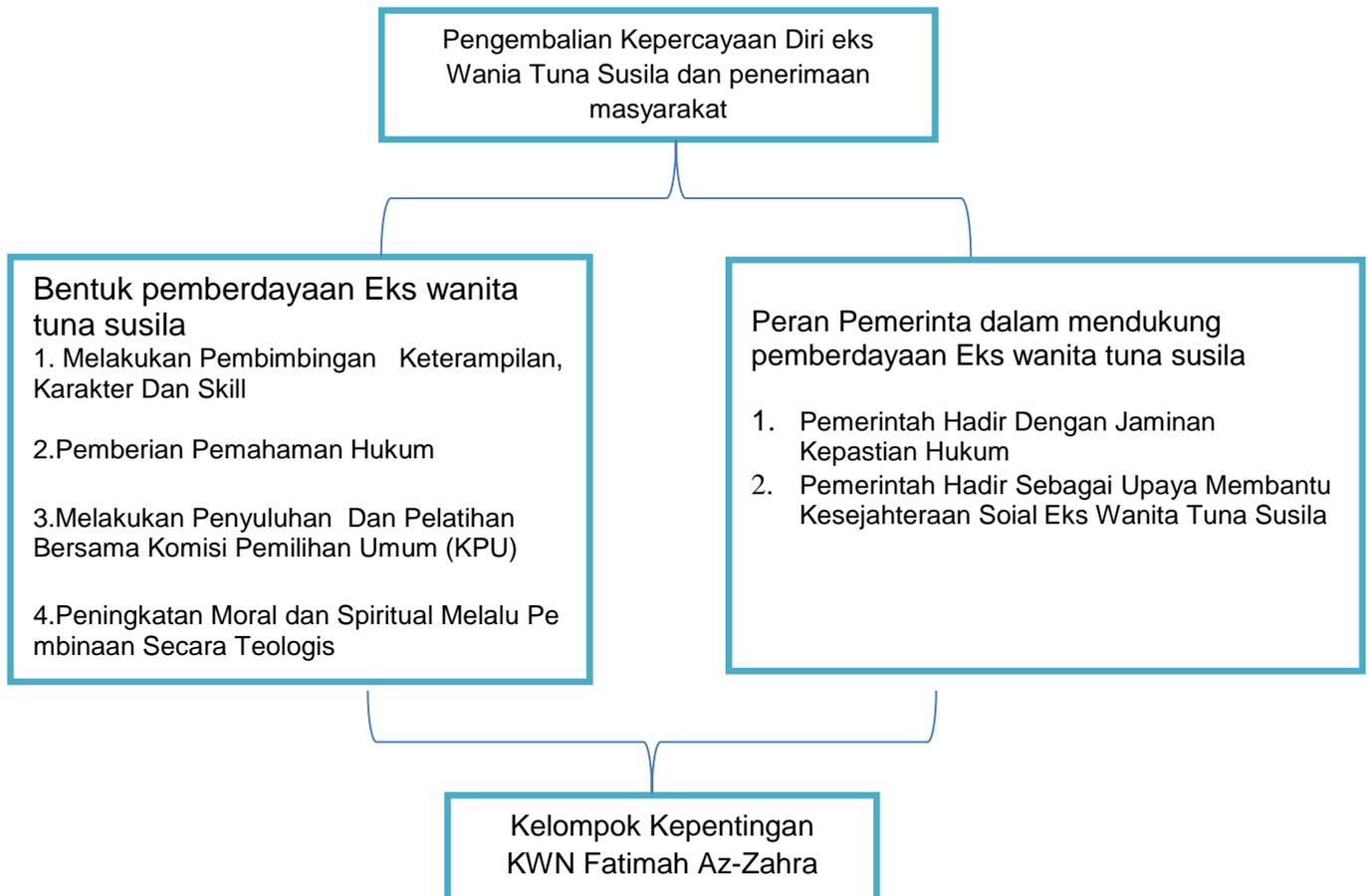
## **2.6 Kerangka Pemikiran**

Keberadaan Wanita Tuna Susiala sebagai bagian integral dari masyarakat dan sebagai warga negara, tidak selayaknya diabaikan begitu saja. Para Wanita Tuna Susila ini perlu dibina agar keberadaan mereka yang dipandang negative itu bisa berubah menjadi aset pembangunan dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan dengan syarat mereka hidup layaknya masyarakat lain dengan normadan adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Kelompok Wanita Nelayan fatimah Az-Zaharah adalah dengan memberikan pembinaan dan pemberdayaan serta membangun kepercayaan diri Wanita Tuna Susila dengan cara melibatkan langsung mereka dengan Program-Program kerja Kelompok Wanita Nelayan. Upaya tersebut mencakup beberapa kegiatan bimbingan. Adapun kegiatan bimbingan yang dilaksanakan antara lain bimbingan moral sosial, Pembimbingan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kesadaran terhadap aktifitas kehidupannya selanjutnya. bimbingan mental, bimbingan sosial/ kemasyarakatan, bimbingan keterampilan, bimbingan resosialisasi serta bimbingan administrasi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan para eks Wanita Tuna Susiala nantinya mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat secara normative. Mereka mampu

mengembalikan harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial, kemauan dan kemampuan mereka, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Upaya pembinaan eks Wanita Tuna Susila yang dilakukan Kelompok Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahrah ini perlu diketahui efektif tidaknya. Untuk mengetahui keefektifan maka perlu adanya suatu penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan bimbingan tersebut dengan melihat dari beberapa indikator antara lain yaitu waktu pencapaian, tingkat pengaruh yang diinginkan, dan komunikasi yang terbuka. Dengan demikian dapat diketahui apakah pemnerdayaan yang dilakukan oleh Kelompok wanita nelayan FaatimaAz-Zahrah itu efektif atau tidak. Hasil dari penilaian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk lebih meningkatkan program pembinaan di Kelompok Wanita Nelayana Fatimah Az-Zahrah dan Pemerintah kota Makassar. Berdasarkan teori dan asumsi di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan.



## 2.7 Tinjauan Hasil Penelitian

Terkait judul penelitian ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis. Namun hal yang membedakan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk program pemberdayaan eks wanita tuna susila di kelompok wanita nelayan Fatimah Az-zahrah dan peran pemerintah dalam membantu pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahrah. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan memiliki keselarasan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Syaiful Rohim, tahun 2010, Universitas Profesor Muhammad Hamka Jakarta, Konsep Diri Eks Wanita Tuna Susila di Panti Sosial, Penelitian

dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep diri mantan psk adalah negatif sebelum masuk rehabilitasi (ketika menjadi psk) berdasarkan motivasi subjek untuk menjadi pelacur, dan juga sebagai citra diri akibat persepsi fisik, mental, dan sosial selama sebagai pelacur. Selain itu ditemukan polarisasi konsep diri menjadi konsep diri yang positif dan negatif setelah bergabung dengan rehabilitasi, berdasarkan persepsi diri fisik, sosial, dan mental. Dari konsep polarisasi diri, terbentuk menjadi tiga tipologi psk mantan, yaitu mantan psk optimis, mantan psk dilematis, dan mantan psk pesimis. Dalam konteks kesiapan adaptasi sosial, juga ditemukan tiga klasifikasi kesiapan adaptasi sosial mantan psk di Bina Karya Wanita "Harapan Mulya" yang menjadi pusat Rehabilitasi Kedoya Jakarta yaitu; mantan psk siap adaptasi, mantan psk tidak siap, dan mantan yang pragmatis atau psk bersyarat.

2. Herlina, tahun 2018, Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNM Makassar, nalisis Strategi Pemasaran Abon Ikan Tuna Pada Kelompok Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahra Di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman memberikan gambaran dan uraian mengenai analisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahra. Teknik

pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan angket.<sup>22</sup>

3. Rizki Nur Utami, tahun 2017, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang, Pembinaan Sosial Wanita Tuna Susila (WTS) di Resosialisasi Argorejo, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Kelurahan Kalibanteng Kulon, Ketua Resosialisasi Argorejo, Ketua LSM Lentera Asa, Pembina, WTS, Pengasuh/Mucikari, dan Masyarakat.<sup>23</sup>
4. Parasiang Manurung, tahun 2018, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyana, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Kelurahan Kalibanteng Kulon, Ketua Resosialisasi Argorejo, Ketua LSM Lentera Asa, Pembina, WTS, Pengasuh/Mucikari, dan Masyarakat, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Kelurahan Kalibanteng Kulon, Ketua Resosialisasi Argorejo, Ketua LSM Lentera Asa, Pembina, WTS, Pengasuh/Mucikari, dan Masyarakat<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Nuraeni, *Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*, (Makassar :Universitas Islam Negeri Makassar, 2014), h. x

<sup>23</sup>Djen Ahmad Idris, *Peran Kepala Desa Konjilo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pembangunan Insfrastruktur Desa*, (Makassar :Universitas Islam Negeri Makassar, 2015), h. viii

<sup>24</sup>Rini Ketrin, *Kepemimpinan Perempuan (studi kasus Kepemimpinan Perempuan diDesa Lattimu, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo)*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2016), h. viii

5. Hardiana, tahun 2018, Hardiana, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, Hasil dari penelitian Strategi pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan deskriptif untuk mengetahui proses strategi pemberdayaan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>25</sup>
6. Dityasa Hanin Forddanta, tahun 2012, Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, Peran Wanita dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin di Ukur dari Sisi Pendataan (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variable tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam menunjang pendapatan wanita dan (2) variable alokasi waktu dan pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan untuk menunjang pendapatan wanita.

---

<sup>25</sup>Hardiana, *Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang*, (Makassar: Univeristas Muhammadiyah, 2018), h.x

Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear dengan metode *ordinary least square* (OLS).<sup>26</sup>

7. Wulan Mustika, tahun 2016, Departemen Dinas Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, *Peran Perempuan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Sumbangan Ekonomi Keluarga*, Metode penelitian adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh nyata baik dari karakteristik responden peserta PEKKA, peran dalam keluarga maupun peran dalam program PEKKA.<sup>27</sup>

Jadi bisa di tarik kesimpulan dari penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas, yang menjadi pembeda antara tesis yang penulis bahas yaitu, penulis lebih fokus pada bagaimana KWN (Kelompok Wanita Nelayan) Fatimah Az-Zahrah berperan dalam peningkatan kepercayaan diri dan penerimaan masyarakat terhadap eks wanita tuna susila melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Nelayan Fatimah Az-Zahrah Di Kelurahan Pattiangalloan.

---

<sup>26</sup>Dityasa Hanin Forddanta, *Peran Wanita dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin diUkur dari Sisi Pendataan (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), h.vii

<sup>27</sup>Wulan Mustika, *Peran Perempuan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Sumbangan Ekonomi Keluarga*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2016 ), h.viii